

POTENSI DAMPAK KERUGIAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, BENCANA BANJIR DAN EKOLOGI AKIBAT RENCANA REKLAMASI DI WILAYAH PANTAI MANADO UTARA OLEH PT. MUP

21 November 2024

Oleh. Perkumpulan Kelola (Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam)

1. Pendahuluan

Secara historis, pesisir pantai Manado Utara dengan Panjang sekitar 2,77 km dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya bahari dengan tradisi sebagai nelayan. Wilayah ini juga dikenal sebagai tempat bermukim Masyarakat Adat Babontehu yang memiliki kekerabatan erat dengan masyarakat penghuni Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen yang berada tidak jauh dari pantai Manado Utara dan sekarang ini merupakan bagian dari Kawasan Taman Nasional Bunaken.

Kehidupan sehari-hari masyarakat di pesisir pantai Manado Utara diwarnai oleh kebiasaan/tradisi bahari yang melekat dan berkembang secara turun-temurun. Pantai menjadi tempat dimana aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat berlangsung. Lokasi pemukiman didirikan langsung berbatasan atau berdekatan dengan pantai, dan sepanjang pantai berpasir (gisik) dijadikan sebagai tempat tambatan perahu. Saat musim berombak, perahu dapat dengan mudah ditarik menjauh dari pantai agar terselamatkan dari amukan gelombang.

Perubahan signifikan terjadi saat infrastruktur Jalan Boulevard II mulai dibangun pada awal 2000an. Pembangunan jalan dimulai dari Kelurahan Sindulang 1 di bagian Selatan pantai Manado Utara dan terus berlangsung hingga seluruh bagian pantai antara daratan dan laut hilang dan berubah menjadi Jl. Boulevard II. Berbagai persoalan serius muncul pasca pembangunan jalan karena masyarakat kehilangan ruang untuk beraktivitas sebagaimana mereka jalani sebelumnya.

Selama beberapa tahun sejak Jalan Boulevard II dibangun, perahu nelayan banyak yang mengalami kerusakan karena dihantam ombak besar. Nelayan di beberapa lokasi mengalami kesulitan saat akan melaut karena mereka harus melewati dinding tepian jalan yang curam dan berbatu. Nelayan kecil yang sudah berusia lanjut tidak bisa lagi melaut. Aktivitas penangkapan ikan menggunakan jaring tarik pantai (soma dampar) yang biasanya sangat mudah dilakukan beramai-ramai sudah semakin sulit dilakukan. Kerabat dari pulau sekitar yang biasanya berkunjung menggunakan perahu mengalami kesulitan saat menambatkan

perahu mereka di pantai. Kawasan pemukiman masyarakat yang landai semakin sering banjir akibat terhambatnya saluran-saluran air menuju ke laut.

Beberapa ruang tambatan perahu kemudian dibangun Pemerintah di beberapa lokasi dan hal tersebut cukup membantu nelayan untuk menambatkan perahu-perahu mereka. Bagi sebagian nelayan yang lain, lokasi tambatan perahu yang relatif jauh dari tempat tinggal mereka menjadi sebuah kendala. Jumlah nelayan kian berkurang sejak hadirnya Jalan Boulevard II disebabkan kesulitan yang mereka hadapi. Sebagian keluarga memanfaatkan peluang dengan berdagang di sepanjang Jalan Boulevard II saat sore hingga malam hari, sebagian yang lain terutama pemuda mencari nafkah sebagai buruh nelayan tidak tetap.

Masyarakat di Kelurahan Karang Ria sedikit lebih beruntung karena lahan gisik yang terbentuk setelah adanya konstruksi tambatan perahu berkembang menjadi lokasi wisata pantai. Aktivitas wisata pantai di tempat ini biasanya sangat ramai pada akhir pekan dengan pengunjung yang mencapai ribuan orang. Nelayan dan keluarga nelayan memanfaatkan situasi ini dengan berdagang dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat disewa oleh pengunjung.

Rencana reklamasi pantai Manado Utara akan menjadi petaka kemanusiaan yang sangat serius jika kemudian tetap dilaksanakan. Masyarakat sebenarnya telah menjadi korban saat mereka kehilangan lahan pantai gisik untuk pembangunan Jl. Boulevard II sehingga jika kemudian kawasan perairan seluas 90 Ha direklamasi maka mereka benar-benar akan kehilangan segala sumber kehidupan yang masih tersisa dan sementara mereka kembangkan, dan kehilangan ini akan bersifat permanen. Di sisi lain, reklamasi akan memperparah ancaman banjir yang saat ini sudah mereka alami.

2. Dampak Kerugian Akibat Reklamasi

A. Dampak/Kerugian Akibat Pemasangan Pagar

Selang bulan Juli hingga September 2024 pihak PT. MUP melakukan kegiatan pemasangan pagar. Pemasangan pagar dimulai dari Kelurahan Sindulang 1 dan terus dilakukan hingga ke wilayah Kelurahan Bitung Karangria. Pagar dipasang melekat langsung pada sisi luar badan Jalan Boulevard II dengan konstruksi baja ringan aluminium. Proses pemasangan pagar dilakukan oleh kontraktor yang bekerjasama dengan PT. MUP. Kegiatan pemagaran oleh PT. MUP selalu didukung oleh aparat pemerintahan kelurahan (Lurah dan Kepala Lingkungan dimana kegiatan pemagaran dilakukan). PT MUP juga menghadirkan beberapa orang sekuriti dan sejumlah orang yang diketahui warga sebagai pekerja di PD

Pasar Bersehati. Beberapa orang masyarakat yang mendukung reklamasi juga sering dihadirkan.

Nelayan dan masyarakat yang menolak reklamasi menilai bahwa pemasangan pagar tidak boleh dilakukan karena akan sangat merugikan bagi masyarakat. Nelayan menjadi terhalang untuk melaut dan jika kondisi laut berombak maka perahu nelayan yang jauh dari tempat tambatan akan hancur atau rusak. Sementara itu, pedagang yang biasa berjualan sore hingga malam hari mengalami kesulitan untuk berdagang dan akan kehilangan pengunjung karena terhalangnya pemandangan laut oleh pagar yang dipasang. Nelayan dan masyarakat pesisir yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi juga berpendapat bahwa rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang penghentian sementara kegiatan reklamasi harus dipatuhi.

Oleh karena itu, selama selang waktu Juli hingga September 2024 masyarakat terus berjaga-jaga dan melakukan penolakan aktivitas pemasangan pagar. Sebagian besar masyarakat meninggalkan pekerjaan mereka, sebagian lain secara bergantian hanya bekerja beberapa saat dan harus kembali untuk bersama-sama menghalangi pemagaran. Benturan antara masyarakat dengan pihak pemasang pagar berulang kali terjadi dan pada beberapa kejadian sangat berpotensi mengarah ke benturan fisik. Bahkan seorang warga yang sempat terluka saat menghalangi pemagaran justru mengalami kriminalisasi oleh aparat kepolisian sektor setempat. Kasusnya masih terus berjalan hingga saat ini.

B. Dampak Kerugian Langsung Akibat Kehilangan Lokasi Penangkapan dan Budidaya Ikan

Secara umum, jumlah nelayan (kepala keluarga nelayan) terus mengalami penurunan, dan laju penurunan jumlah kepala keluarga nelayan relatif signifikan sejak lahan pantai gisik sepanjang pesisir pantai Manado Utara diubah menjadi Jl. Boulevard II. Saat ini, data jumlah nelayan di wilayah ini dilaporkan berbeda-beda oleh sejumlah pihak. Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Manado melaporkan sebanyak 29 kelompok (290 nelayan) nelayan kelompok binaan. Data tersebut belum termasuk nelayan yang tidak membentuk kelompok. Hasil survey mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Universitas Sam Ratulangi melaporkan sebanyak 809 kepala keluarga nelayan di wilayah kecamatan yang akan terdampak reklamasi. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari kondisi jumlah nelayan sebelum Jl. Boulevard II dibangun. Namun demikian, jumlah nelayan sebenarnya cukup besar di kawasan ini. Mereka akan kembali melaut jika punya kemampuan membeli perahu atau dibantu oleh pihak lain.

Sebagian anak-anak nelayan bekerja sebagai buruh nelayan tidak tetap. Merekapun akan melaut jika sudah tersedia perahu yang mereka dapat gunakan sendiri.

Lahan seluas 90 Ha merupakan lokasi penangkapan ikan pantai (ikan zona neritik) yang biasanya ditangkap oleh nelayan menggunakan jaring tarik pantai atau dalam bahasa lokal dinamakan Soma Dampar. Alat tangkap ini biasa dioperasikan oleh sekitar 5 -10 orang, dan saat penarikan masyarakat lainnya dapat turut serta. Hasil tangkapan biasanya bervariasi, tergantung kondisi ikan saat pemasangan jaring. Pemasangan jaring biasanya dilakukan beberapa kali dalam sehari. Alat tangkap yang lain yaitu berupa jaring insang yang dioperasikan pada lokasi-lokasi tertentu yang sudah diketahui oleh nelayan sebagai lokasi tangkap ideal. Sebagian besar nelayan di Manado Utara juga melakukan pemancingan ikan dasar (demersal fishes) pada lokasi-lokasi yang sudah diketahui dan biasa dinamai napo.

Semua kegiatan penangkapan ikan baik menggunakan jaring maupun pancing (handline) akan hilang jika lahan seluas 90 Ha direklamasi. Nelayan akan kehilangan hasil tangkap dan pendapatan dari hasil penjualan ikan tangkapan.

Selain melakukan aktivitas penangkapan, sebagian nelayan juga melakukan aktivitas budidaya yang dikenal dengan istilah Karamba Jaring Apung. Jenis ikan yang dibudidaya yaitu bubara (*Caranx* sp), bernilai ekonomis penting. Karamba jaring apung yang biasanya banyak terpasang di wilayah pantai Manado Utara, saat ini semakin berkurang karena nelayan khawatir kawasan pantai tersebut akan segera direklamasi. ***Semua aktivitas budidaya Karamba jaring apung akan hilang jika 90 Ha perairan pantai direklamasi.***

Satu kegiatan perikanan tangkap yang unik dan hanya ada di Manado Utara adalah penangkapan juvenil ikan nikel (*Gobidae*). Penangkapan ikan nikel dilakukan secara musiman menggunakan jaring tagaho. Hampir semua nelayan di pesisir pantai Manado Utara akan melakukan penangkapan saat musimnya tiba. ***Aktivitas penangkapan ikan ini akan hilang jika 90 Ha perairan pantai direklamasi.*** Sebagai catatan, keberadaan juvenile ikan nikel di perairan pantai ini bersifat sementara sebelum ikan-ikan tersebut kembali memasuki Sungai Tondano saat berukuran tertentu. ***Perairan pantai 90 Ha yang akan direklamasi merupakan alur migrasi ikan tersebut.*** Terkait alur migrasi ikan nikel, semestinya ini menjadi pertimbangan penting saat pembuatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP3K dan studi kelayakan terkait rencana reklamasi. Sayangnya, hal tersebut ternyata dikesampingkan.

C. Dampak Kerugian Akibat Kehilangan Kawasan Wisata Bitung Karangria

Kawasan Wisata Pantai Bitung Karangria terus berkembang sejak hadirnya tambatan perahu berbentuk U di Bitung Karangria pada tahun 2010. Kehadiran tambatan perahu di tempat ini adalah hasil perjuangan masyarakat yang diperoleh sebagai kompensasi dilanjutkannya pembangunan Jl. Boulevard 2. Posisi dan konstruksi tambatan perahu yang dibangun menyebabkan secara perlahan terendapkannya sedimen pasir di dalam ruang tambatan dan memanjang ke arah Utara. Saat ini, panjang lahan gisik yang sudah terbentuk bervariasi antara 100 – 150 meter tergantung kondisi pasang-surut. Keberadaan lahan gisik yang indah dan perairan pantai yang landai menyebabkan pantai Bitung Karangria menjadi pilihan masyarakat Kota Manado khususnya di bagian Utara untuk menikmati liburan akhir pekan. Ribuan masyarakat bertamasya di pantai ini setiap akhir pekan. Nelayan dan masyarakat Kelurahan Bitung Karangria memanfaatkan keramaian di pantai ini untuk berbagai aktivitas yang mendatangkan keuntungan seperti wisata kuliner/berjualan, sewa-menyewa peralatan mandi dan perahu, serta sewa tempat parkir. Saat-saat tertentu pantai ini dijadikan tempat pelaksanaan lomba perahu, dan olah raga air lainnya. ***Jika direklamasi, tempat wisata masyarakat umum akan hilang, nelayan dan masyarakat lokal akan kehilangan sumber pendapatan secara permanen.***

D. Dampak Kerugian Akibat Kehilangan Tambatan Perahu Yang Layak dan Aman

Sebelum ada rencana reklamasi dan setelah pembangunan Jl. Boulevard 2 selesai, pemerintah telah membangun 6 tambatan perahu di sepanjang pantai yang akan direklamasi. Tambatan perahu dibangun berbentuk U dengan bukaan menghadap ke arah Utara dengan tujuan agar perahu nelayan dapat terlindungi ketika gelombang besar saat musim Barat dan Barat Daya. Kehadiran enam tambatan perahu tersebut masih belum mencukupi untuk perahu-perahu nelayan di beberapa lokasi sehingga pada saat kondisi berombak besar masih banyak terlihat perahu-perahu nelayan dinaikan ke atas Jl. Boulevard II yang lebih tinggi, beberapa perahu yang terlambat dinaikan ke jalan pasti hancur atau mengalami kerusakan karena berbenturan dengan batu-batu besar sepanjang tepi sebelah laut Jl. Boulevard II. Meskipun belum sepenuhnya memberi perlindungan, kehadiran tambatan-tambatan perahu yang berdekatan dengan pemukiman nelayan cukup memberi kemudahan akses untuk melaut, nelayan juga masih bisa melakukan perawatan alat-alat produksi mereka dengan adanya lahan gisik yang terbentuk di sisi sebelah dalam ruang tambatan perahu.

Sejak bulan Juni 2024 pengembang (PT. MUP) mulai membangun sebuah tambatan perahu di ujung sisi Selatan kawasan yang akan direklamasi, tepatnya di muara Sungai Tondano. Rencananya, tambatan yang dibangun di lokasi ini diperuntukan untuk nelayan-

nelayan yang bermukim di Kelurahan Bitung Karangria, Sindulang 1 dan Sindulang 2. Pada 14 Oktober 2024 PT. MUP memulai pekerjaan pembuatan tambatan perahu di ujung sisi Utara lahan yang akan direklamasi. Rencananya, tambatan di lokasi ini akan diperuntukan bagi nelayan di Kelurahan Maasing, Tumumpa 1 dan Tumumpa 2.

Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi menolak keras pembangunan kedua tambatan oleh PT. MUP. Mereka melakukan aksi-aksi penolakan keras di lapangan karena beberapa alasan. Pertama, perahu-perahu nelayan sudah pasti akan menjadi korban dan bahkan korban jiwa jika kemudian ditempatkan di dua lokasi tambatan perahu tersebut. Kondisi perairan yang terdampak ombak besar saat musim Barat dan Barat Daya akan membahayakan bagi perahu nelayan untuk memasuki ke dua lokasi yang akan ditempati. Sebelum memasuki lokasi tambatan, perahu nelayan harus berhadapan dengan dinding batu-batu besar sebelah laut yang sudah terlebih dahulu terkena gelombang. Pengalaman seperti ini sudah dialami oleh nelayan-nelayan di wilayah Teluk Manado lainnya pasca reklamasi. Kedua, posisi kedua tambatan akan mengalami sedimentasi, menjadi dangkal dan akhirnya tak bisa digunakan. Selain itu, kedua tambatan akan menjadi tempat segala macam sampah terakumulasi. Ketiga, jarak lokasi tambatan yang jauh dari pemukiman dan dikumpulkan bersama nelayan-nelayan dari kelurahan lainnya akan sangat beresiko bagi keamanan peralatan-peralatan yang biasa ditinggalkan di perahu, berpotensi konflik dengan nelayan lainnya, dan sudah pasti akan menyulitkan bagi nelayan menuju maupun meninggalkan lokasi tambatan.

E. Dampak Kerugian Ekologis

Selain kehilangan spesies-spesies ikan neritik, ikan demersal dan ikan nikel yang selama ini hidup dan ditangkap secara berkelanjutan oleh nelayan di kawasan yang akan direklamasi, masyarakat juga akan kehilangan ekosistem terumbu karang yang masih tersisa dan dijaga oleh masyarakat di sisi sebelah utara kawasan yang akan direklamasi. PT MUP sudah pasti akan mengesampingkan keberadaan ekosistem tersebut karena mereka mengatakan bahwa “terumbu karang mati maupun hidup” tidak ditemukan di perairan tersebut. Upaya untuk menyelamatkan terumbu karang tersisa di perairan ini terus dilakukan oleh nelayan dan masyarakat pesisir tetapi hanya diabaikan. Laporan tentang adanya penyampaian informasi sesat/tidak benar yang diduga berasal dari studi lingkungan yang tidak benar juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian tetapi hingga kini prosesnya berjalan sangat lambat. Upaya untuk mempelajari hasil studi lingkungan dalam bentuk permintaan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan kepada pihak Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara juga tidak diberikan sehingga harus disengketakan oleh Komisi Informasi Sulawesi Utara, dan hasil persidanganpun tidak dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara.

F. Dampak Kerugian Bencana Banjir

Sejak hadirnya Jalan Boulevard II beberapa wilayah yang relatif rendah di Kelurahan Karang Ria, Kelurahan Maasing, dan Kelurahan Tumumpa 1 dan 2 lebih sering terendam air di saat musim hujan. Hal tersebut terjadi karena aliran air yang semestinya sudah mengalir ke laut tertahan oleh adanya konstruksi jalan. Sepanjang tahun 2024 banjir yang terjadi di beberapa lokasi yang rendah tersebut semakin meluas dengan ketinggian genangan yang lebih tinggi. Gangguan hidrologi di wilayah pesisir akan lebih serius jika kawasan pantai seluas 90 Ha diubah menjadi daratan. Akibatnya, bencana banjir di wilayah daratan pesisir yang rendah akan lebih meluas dan ketinggian genangan air akan semakin tinggi. Potensi banjir di wilayah pesisir terdampak reklamasi terutama akan dialami oleh kawasan yang terkategori landai dengan kemiringan 0 – 2 % yang mencakup luasan 49,16 Ha (Scientific Exploration Team, 2024). Studi lain melaporkan luasan rawan banjir di wilayah tersebut seluas 31,78 Ha (Hasil Survei Mahasiswa Perencanaan Wilayah Perkotaan Universitas Sam Ratulangi).

G. Dampak Kerugian Sosial dan Budaya

Masalah sosial telah muncul sejak pertama kali rencana reklamasi oleh PT. MUP di Manado Utara tersebar secara meluas di tengah masyarakat. Berbagai media koran maupun elektronik banyak memberitakan tentang rencana reklamasi oleh PT. MUP di pantai Manado Utara. Muncul berbagai pandangan di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang terdampak langsung rencana reklamasi secara terbuka melakukan penolakan. Demikian halnya dengan masyarakat yang tinggal di kepulauan terdekat seperti Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua dan Pulau Bunaken. Menanggapi adanya penolakan, PT. MUP memanfaatkan sejumlah orang lokal untuk mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk mendukung rencana reklamasi. Munculnya kelompok-kelompok tersebut menyebabkan suasana di beberapa kegiatan pertemuan berlangsung sangat emosional dan nyaris bentrok antara kelompok yang menolak dan mendukung reklamasi. Perselisihan antar sesama warga juga bermunculan. Rencana reklamasi menyebabkan perpecahan dan permusuhan antar sesama warga. Sementara itu, keberpihakan aparat pemerintahan kelurahan kepada PT. MUP

menyebabkan timbulnya kemarahan masyarakat. Seiring perjalanan waktu, potensi pecahnya konflik di tengah masyarakat semakin besar.

Rencana reklamasi mengancam keberlangsungan Masyarakat Adat Babontehu. Kebersamaan dan kekerabatan yang selama ini terjalin erat terancam oleh adanya rencana reklamasi. Demikian halnya dengan karakteristik dan nilai-nilai budaya bahari yang melekat kuat dalam kehidupan Masyarakat Adat Babontehu akan terancam hilang jika reklamasi perairan pantai di Manado Utara tetap dilakukan. Hubungan kekerabatan Masyarakat Adat Babontehu dengan saudara mereka yang tinggal di beberapa pulau terdekat juga akan sangat terganggu oleh karena kehilangan pantai yang sejak dahulu mereka gunakan untuk mendaratkan perahu mereka saat mengunjungi kerabat yang tinggal di pesisir pantai Manado Utara.